**KONSEP HUKUM DAN SUBJEK SUKUM DALAM USHUL FIKIH :
ANALISIS INTERKONEKSITAS****Itang Komar**Program Studi Hukum Keluarga Islam - Institut Agama Islam Tasikmalaya
Itangkomardidi@gmail.com**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Konsep Hukum dan Subyek Hukum dalam Ushul Fiqih : analisis interkonektif dengan Hukum Positif, Para Sarjana Hukum dan KHES. Objek penelitiannya adalah hukum itu sendiri terdiri dari bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitiannya adalah penelitian Hukum Normatif, disebut juga Doktriner atau Kepustakaan. Ditemukan ada 2 Interkoneksitas yaitu Interkoneksitas persamaan dan Interkoneksitas yang satu merupakan bagian dari yang lain. Interkoneksitas Persamaan ada 4 macam yaitu antara Konsep Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Hukum dalam Hukum Positif, antara Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Subjek Hukum dalam KHES, antara Konsep Subjek Hukum dalam KHES dengan Konsep Subjek Hukum menurut Para Sarjana Hukum, dan antara Konsep Subjek hukum dalam Ushul fiqih dan konsep Subjek hukum menurut para Sarjana hukum. Interkoneksitas Bagian Yang Lain ada 3 macam yaitu antara Konsep Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih itu sendiri, antara Konsep Hukum dalam Hukum Positif dengan Konsep Subjek Hukum dalam KHES dan antara Konsep Hukum dalam Hukum Positif dengan Konsep Subjek Hukum menurut Para Sarjana hokum

Kata Kunci: Konsep Hukum, Subjek Hukum, Ushul Fiqih, Interkoneksitas

Abstract.

The purpose of this study was to determine the concept of law and legal subjects in Ushul Fiqh: interconnective analysis with Positive Law, Law Graduates and KHES. The object of the research is that the law itself consists of library materials or secondary data. The research method is normative law research, also known as doctrinaire or library research. It was found that there are 2 interconnections, namely the equation interconnection and the interconnectivity of which one is part of the other. There are 4 kinds of interconnections, namely between the concept of legal subject in Ushul Fiqh and the concept of law in positive law, between the concept of legal subject in Ushul Fiqh and the concept of legal subject in KHES, between the concept of legal subject in KHES and the concept of legal subject according to legal scholars, and between The concept of legal subjects in Usul fiqh and the concept of legal subjects according to legal scholars. There are 3 kinds of interconnection between the other parts, namely between the concept of law in Ushul Fiqh and the concept of legal subjects in Usul Fiqh itself, between the concept of law in positive law and the concept of legal subject in KHES and between the concept of law in positive law and the concept of legal subject according to scholars. law.

Keywords: Legal Concepts, Legal Subjects, Usul Fiqh, Interconnectivity

PENDAHULUAN

Hukum Syara' dihasilkan dari adanya suatu ilmu yang dinamakan ilmu Ushul Fiqih. Karena Ushul Fiqih itu sendiri adalah mengetahui kaidah-kaidah kulli (umum) yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang rinci (Chaerul Umam. Ushul Fiqih 1. 2000).

Ushul Fiqih dikenal adanya Syari' (Pembuat Hukum), Mahkum 'alaih (Subyek Hukum) dan Mahkum Fiih (Obyek Hukum). Syar'i atau pembuat hukum dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan hakim yang secara etimologi mempunyai dua pengertian yaitu Pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum. Atau Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkapkan hukum (Chaerul Umam. Ushul Fiqih 1. 2000).

Dilihat dari Pembuat Hukumnya, antara Hukum Syara' dan Hukum Positif ini sangat berbeda karena kalau Hukum Syara' dibuat oleh Alloh SWT sedangkan Hukum Positif dibuat oleh Lembaga Legislatif. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan pada benak peneliti, apakah ada Interkoneksi antara hukum positif dan hukum syara', lebih jauh peneliti ingin menganalisa Interkoneksi ini bahkan tidak sampai disitu, ingin pula meneliti Interkoneksi dengan pendapat para ahli hukum dan juga dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tentu saja karena Hukum Positif dan Hukum Syara' ini sangat luas maka peneliti akan membatasi penelitian ini hanya pada konsep hukum dan subyek hukumnya saja.

Penelitian ini sangat penting bagi peneliti dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian, meningkatkan mutu kompetensi,

meningkatkan jumlah penelitian bahkan semoga bisa menemukan temuan baru. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah bagaimana konsep hukum dan subyek hukum dalam Ushul Fiqih dan bagaimana konsep hukum dan subyek hukum dalam Ushul Fiqih : analisis interkoneksi dengan Hukum Positif, Para Sarjana Hukum dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep hukum dan subyek hukum dalam Ushul Fiqih dan mengetahui konsep hukum dan subyek hukum dalam Ushul Fiqih : analisis interkoneksi dengan Hukum Positif, Para Sarjana Hukum dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

KAJIAN LITERATUR

Pada dasarnya para ahli ushul menjadikan hukum itu nama bagi segala titah Allah/ nabi, baik titah itu mengandung makna perintah, larangan, ataupun bersifat pilihan yang berarti kebolehan bagi mukallaf untuk memilih antara dikerjakan dan ditinggalkan maupun titah itu menyatakan suatu sebab, syarat, dan mani' atau mencegah/menghalangi suatu pekerjaan atau perbuatan yang sah atau rusak. Contoh firman Allah Aqimu al-shalata yang artinya dirikanlah shalat ! atau wala taqrabu al-zina yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Atau hadits Nabi al-qaatilu laa yaritsu mina al maqtuuli yang artinya pembunuh itu tidak mendapat pusaka dari yang dibunuhnya. Ketiga contoh diatas dinamai hukum oleh ushul fiqih (Chaerul Umam. Ushul Fiqih 1. 2000).

Ulama Ushul Fiqih telah sepakat bahwa maḥkūm 'alaih atau Subjek Hukum adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut mukallaf. Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun

wadh'i. Hukum taklifi meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wadh'i meliputi ketentuan sebab, syarat, dan mani'. Dalam ilmu hukum ada sejumlah definisi hukum menurut berbagai fungsi dan aspeknya. Menurut aliran teologis, hukum merupakan produk akal yang amat erat kaitannya dengan konsep dan tujuan, dan keadilan dianggap sebagai tujuan tertinggi. Adapun aliran historis savigny (aliran yang mengajarkan bahwa sumber hukum adalah kebiasaan yang mendarah daging dalam pikiran manusia) memandang hukum sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hukum dikembangkan oleh sesuatu proses lambat, seperti halnya bahasa yang lahir sebagai produk khusus kejeniusan suatu bangsa. Sedangkan menurut aliran imperative Austin, hukum adalah sesuatu aturan umum tingkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok yang lebih rendah (Muhammad Muslehudin, 1997).

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum (Media : <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-subjek-hukum>).

Peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasarudin Umar (2014) yang berjudul "Konsep Hukum Modern :

Suatu Perspektif Ke-Indonesia-an, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional". Hasil Penelitiannya dideskripsikan sebagai berikut : Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum campuran. Sistem hukum yang saat ini berlaku didominasi oleh tiga sistem hukum besar, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Percampuran sistem hukum ini bukan tak masalah, karena pada hakikatnya setiap sistem hukum memiliki karakter yang berbeda. Problem paling dasar adalah pembentukan hukum yang tidak berimbang, yaitu dominasi sistem hukum Barat atas hukum agama dan adat. Tulisan ini mengurai konsep integrasisistem hukum agama dalam sistem hukum nasional agar kedudukannya dapat berimbang. Berdasarkan hasil analisa, konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang integratif merupakan konsep hukum yang tepat untuk sistem hukum modern Indonesia dalam rangka mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan agama (Nasarudin Umar, 2014).

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Analiansyah (2017) yang berjudul "Pengembangan Subyek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Islam di Indonesia". Hasil Penelitiannya dideskripsikan sebagai berikut : Subjek hukum dalam ilmu Usul Fikih disebut mahkūm 'alaih (orang yang dibebani hukum). Orang yang sudah mampu menerima beban hukum disebut mukallaf. Secara teoritis, mahkūm 'alaih adalah orang sebagai individu, tidak termasuk di dalamnya lembaga. Seiring dengan perubahan zaman, subjek hukum juga mengalami perkembangan, seperti terlihat dalam masalah zakat dan wakaf. Dengan demikian perlu dijelaskan bagaimanakah

perubahan subjek hukum (maḥkūm ‘alaih) dalam undang-undang zakat dan waqaf di Indonesia dan apakah pengaruhnya terhadap pengembangan konsep maḥkūm ‘alaih dalam Ilmu Usul Fikih. Teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menerangkan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya perubahan waktu dan tempat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah integrasi dan interkoneksi dengan hukum perdata Indonesia (Analiansyah, 2016).

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2018) yang berjudul “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”. Hasil penelitiannya dideskripsikan sebagai berikut : Syariat, adalah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ushul fiqh berarti suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Perbedaan Syariah dengan fikih, Syariah itu berasal dari Al-Qur'an dan As-sunah, bersifat fundamental, hukumnya bersifat Qath'i , Hukum Syariatnya hanya Satu langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan Fiqih itu karya manusia yang bisa berubah, hukumnya dapat berubah, banyak ragam, berasal dari Ijtihad ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh Mujtahid (Nurhayati, 2020).

Penelitian yang keempat yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh E. Fernando M. Manullang (2021) yang berjudul “Subyek Hukum

Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional : Antara Manipulasi dan Fiksi” .Hasil penelitiannya dideskripsikan sebagai berikut : Konsep subjek hukum adalah salah konsep inti dalam hukum. Dalam teori tradisional, konsep ini hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban belaka. Sementara Hans Kelsen melihat bahwa ada persoalan kuasa dalam hak dan kewajiban. Namun, kuasa ini bukanlah kuasa terutama dalam konsep subjek hukum, karena menurut teori tradisional, ada kuasa di baliknya yang menentukan sesuatu itu adalah subjek hukum yang memiliki kuasa hak atau tidak. Relasi antarkuasa ini berpotensi tidak adil, dan bahkan berpotensi menjadi jahat, karena secara potensial ada manipulasi berbaur fiksi atas nama keyakinan agama atau pandangan sosial tertentu, sehingga si penguasa ini dapat menentukan sesuatu itu adalah subjek hukum yang memiliki kuasa atau tidak. Jikalau tidak memiliki kuasa, maka sanksi akan disiapkan untuk menghukum perilaku yang dianggap menyimpang (E. Fernando M. Manullang, 2021).

Penelitian yang kelima yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Doli Witro, Mhd.Rasidin dan Muhamad Izazi Nurjaman (2021) yang berjudul “Subyek Hukum dan Obyek Hukum : Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata”. Hasil penelitiannya dideskripsikan sebagai berikut : Mahkum fih adalah objek hukum atau diartikan sebagai perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul. Dalam pembahasan objek hukum tidak terlepas dari subjek hukum. Dalam ilmu ushul fikih subjek hukum disebut dengan maḥkūm alaih (Doli Witro, Mhd.Rasidin dan Muhamad Izazi Nurjaman, 2021)

Peneliti membuat hipotesis sebagai berikut : Ada Interkoneksi antara konsep hukum dalam ushul fiqh dengan

konsep subyek hukum dalam ushul fiqih. Ada Interkoneksi antara konsep hukum dalam ushul fiqih dengan konsep hukum dalam hukum positif. Ada Interkoneksi antara konsep subyek hukum dalam ushul fiqih dengan konsep subyek hukum dalam KHES. Ada Interkoneksi antara konsep subyek hukum dalam ushul fiqih dengan konsep subyek hukum menurut para sarjana hukum. Ada Interkoneksi antara konsep hukum dalam hukum positif dengan konsep subyek hukum menurut para sarjana hukum. Ada Interkoneksi antara konsep subyek hukum dalam KHES dengan konsep subyek hukum menurut para sarjana hukum. Ada Interkoneksi antara konsep hukum dalam hukum positif dengan konsep subyek hukum dalam KHES.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti saat ini ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji berbagai aspek seperti aspek teori, perbandingan, konsistensi dan penjelasan umum. Dilihat berdasarkan sudut bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian preskriptif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pendapat hukum, telaah hukum, audit hukum dll. Tentu saja penelitian pada saat ini peneliti akan memberikan telaah hukum terhadap isu hukum yang dihadapi.

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian pada saat ini akan menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun

asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sumber Bahan Hukumnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi dan lain-lain. Semua bahan yang sesuai dengan isu yang diteliti akan digunakan oleh peneliti (Philipus M. Hadjon, at.al, 1997)/

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Mengidentifikasi fakta hukum yang diangkat menjadi penelitian. Mengeliminir hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya (relevan) untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan saran/preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Media : <https://www.hukumkeadilan.com/2021/02/langkah-langkah-serta-tujuan-html>)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk di negara Indonesia kebanyakan beragama Islam sehingga tidak heran kalau dikenal pula adanya hukum Islam bahkan dalam agama tersebut dikenal satu metode pengambilan hukum yang disebut dengan Ushul Fiqih. Banyak istilah yang digunakan dalam ilmu Ushul Fiqih dengan macam-macam hukumnya namun tetap merupakan satu kesatuan besar yang disebut dengan hukum. Dalam hukum itu sendiri dikenal adanya konsep hukum dan subyek hukum. Kedua istilah ini bisa kita temukan baik dalam Ushul Fiqih, hukum Positif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maupun dalam pandangan para Sarjana Hukum. Kedua istilah ini memiliki Interkoneksi dari satu hal ke hal. Dari gambar Interkoneksi Konsep Hukum dan Subjek Hukum bisa kita lihat, ada dua Interkoneksi yang berbeda yaitu Interkoneksi karena memiliki persamaan dan Interkoneksi karena yang satu merupakan bagian dari yang lainnya. Interkoneksi persamaan ada 4 macam yaitu Interkoneksi Konsep Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Hukum dalam Hukum Positif. Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Subjek Hukum dalam KHES. Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam KHES dengan Konsep Subjek Hukum menurut Para Sarjana Hukum. Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam KHES dengan Konsep Subjek Hukum menurut Para Sarjana Hukum.

Interkoneksi yang satu merupakan bagian dari yang lainnya terdiri dari 3 Interkoneksi yaitu Interkoneksi Konsep hukum dalam Ushul fiqh dengan konsep subjek hukum dalam Ushul fiqh itu sendiri, Interkoneksi Konsep hukum dalam hukum positif dengan konsep Subjek hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Interkoneksi

Konsep hukum dalam hukum Positif dengan konsep Subjek hukum menurut para Sarjana hukum.

- 1) Interkoneksi Konsep Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Hukum dalam Hukum Positif.

Dalam ilmu Ushul fiqh dikenal adanya hukum taklifi yaitu hukum syari' yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Kemudian, para ulama Ushul fiqh membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian yang dinamakan al-ahkam al-khomsah oleh ahli fiqh, diantaranya : wajib, haram, mandub (sunnah), makruh dan mubah. Dalam hukum Positif dikenal beberapa pengertian hukum diantaranya hukum ialah Himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah (E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Jakarta : Ikhtiar Baru 1983). Juga ada yang memberikan pengertian bahwa hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu atau sanksi (J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sstropnato, 1980). Ada juga yang mengatakan bahwa hukum adalah Karya manusia berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertamanya hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide tentang keadilan (Satjipto

Rahardjo, 1996). Juga pengertian berikut bahwa hukum adalah Ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan.

Pada hakikatnya hukum merupakan rumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya/seyogyanya seseorang bertindak laku. Hukum tersebut bersifat umum dan pasif (Sudikno Mertokusumo, 1985). Kalau kita melihat dari pemaparan tadi mengenai pengertian hukum menurut Ushul Fiqih dan pengertian Hukum menurut Hukum Positif, maka ada Interkoneksi akibat persamaan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

2) Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Subjek Hukum dalam KHES.

Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa Subjek Hukum atau Mahkum 'alaihi ialah orang itu telah mampu memahami khithab Syar'i (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif (Rachmat Syafe'i, 2019)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan Subjek Hukum dituangkan dalam Buku 1 tentang Subjek Hukum dan Amwal. Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa Subjek Hukum adalah orang perorangan atau Persekutuan atau Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Dari Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih dan Konsep Subjek Hukum

dalam KHES ini dapat disimpulkan bahwa Subjek Hukum itu adalah orang yang mampu memahami khithab syar'i atau cakap hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

3) Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam KHES dengan Konsep Subjek Hukum menurut Para Sarjana Hukum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan Subjek Hukum dituangkan dalam Buku 1 tentang Subjek Hukum dan Amwal. Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa Subjek Hukum adalah orang perorangan atau Persekutuan atau Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana hukum. Diantaranya Subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Subjek hukum menurut Sjachran adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtbevegtheid*. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sstropnato, 1980).

Dari pendapat para sarjana ini bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang yaitu manusia dan badan hukum. Kemudian tadi juga dalam KHES disebutkan bahwa subjek hukum itu adalah seseorang atau badan usaha. Dalam hal ini ada kesamaan mengenai subjek hukum baik menurut KHES maupun pendapat para sarjana hukum. Jadi ada Interkoneksi karena kesamaan antara konsep Subjek hukum dalam KHES dan konsep Subjek hukum menurut para Sarjana hukum.

- 4) Interkoneksi Konsep Subjek hukum dalam Ushul fiqh dan konsep Subjek hukum menurut para Sarjana hukum.

Ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa Subjek Hukum atau Mahkum 'alaihi ialah orang itu telah mampu memahami khithab Syar'i (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif (Rachmat Syafe'i, 2019)

Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana hukum. Diantaranya Subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Subjek hukum menurut Sjachran adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtbevegtheid*. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum

diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sstropnato, 1980).

Dari Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih dan Konsep Subjek Hukum menurut para Sarjana Hukum ini dapat disimpulkan bahwa Subjek Hukum itu adalah orang yang mampu memahami khithab syar'i atau cakap hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

- 5) Interkoneksi Konsep hukum dalam Ushul fiqh dengan konsep subjek hukum dalam Ushul fiqh itu sendiri.

Dalam ilmu Ushul fiqh dikenal adanya hukum taklifi yaitu hukum syar'i yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Kemudian, para ulama Ushul fiqh membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian yang dinamakan al-ahkam al-khomsah oleh ahli fiqh, diantaranya : wajib, haram, mandub (sunnah), makruh dan mubah.

Orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Usul Fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Mukallaf ini disebut sebagai Subjek Hukum. Dengan demikian Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih ini merupakan bagian dari Konsep Hukum dalam Ushul Fiqih itu sendiri.

- 6) Interkoneksi Konsep hukum dalam hukum positif dengan konsep Subjek hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum positif merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu atau dengan kata lain hukum atau aturan yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. Dengan

demikian hukum positif berarti hukum yang sedang diberlakukan oleh negara kepada masyarakatnya pada saat itu. Hukum positif ini banyak sekali, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada Peraturan Menteri, ada Peraturan Mahkamah Agung, ada Peraturan Gubernur, ada Peraturan Walikota dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut sedang berlaku di negara ini. Ini disebut dengan hukum positif.

Subyek Hukum diatur dalam UUD 1945 Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian setelah Indonesia merdeka jelas semua orang (manusia pribadi) adalah pendukung hak dan kewajiban (Subyek Hukum) dalam hubungan-hubungan hukum sehingga melarang sistem perbudakan, perhambaan, maupun peruluran. Subyek hukum diatur dalam KUH Perdata Orang merupakan subyek hukum disamping badan hukum. Ini merupakan hukum yang berlaku secara universal dalam sistem hukum manapun. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan Subjek Hukum dituangkan dalam Buku 1 tentang Subjek Hukum dan Amwal. Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa Subjek Hukum adalah orang perorangan atau Persekutuan atau Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum (Mardani, 2015).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian jelas bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan bagian dari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia.

- 7) Interkoneksi Konsep hukum dalam hukum Positif dengan konsep Subjek hukum menurut para Sarjana hukum.

Hukum positif merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu atau dengan kata lain hukum atau aturan yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. Dengan demikian hukum positif berarti hukum yang sedang diberlakukan oleh negara kepada masyarakatnya pada saat itu. Hukum positif ini banyak sekali, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada Peraturan Menteri, ada Peraturan Mahkamah Agung, ada Peraturan Gubernur, ada Peraturan Walikota dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut sedang berlaku di negara ini. Ini disebut dengan hukum positif. Subyek Hukum diatur dalam UUD 1945 Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian setelah Indonesia merdeka jelas semua orang (manusia pribadi) adalah pendukung hak dan kewajiban (Subyek Hukum) dalam hubungan-hubungan hukum sehingga melarang sistem perbudakan, perhambaan, maupun peruluran.

Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana hukum. Diantaranya Subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Subjek hukum menurut

Sjachran adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtbevegtheid*. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tututan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sstropnato, 1980).

Dengan demikian Subjek Hukum menurut para Sarjana Hukum merupakan bagian dari Konsep Hukum dalam Hukum Positif.

SIMPULAN

Menurut ahli Ushul Fiqih, hukum ialah khitab Allah (atau sabda Nabi) yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau penghalang bagi sesuatu hukum. Sedangkan Subyek Hukum adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut mukallaf. Dalam definisi ini, subyek hukum hanya dipahami kepada orang (*syakhṣ*) saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum.

Ditemukan bahwa ada 2 Interkoneksi yaitu Interkoneksi karena memiliki persamaan dan Interkoneksi karena yang satu merupakan bagian dari yang lain. Interkoneksi Persamaan terdiri dari Interkoneksi Konsep Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Hukum dalam Hukum Positif. Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fiqih dengan Konsep Subjek Hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Interkoneksi Konsep Subjek Hukum dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah dengan Konsep Subjek Hukum menurut Para Sarjana Hukum. Interkoneksi Konsep Subjek hukum dalam Ushul fiqih dan konsep Subjek hukum menurut para Sarjana hukum. Interkoneksi yang satu merupakan bagian dari yang lainnya maka ada 3 Interkoneksi yaitu : Interkoneksi Konsep hukum dalam Ushul fiqih dengan konsep subjek hukum dalam Ushul fiqih itu sendiri. Interkoneksi Konsep hukum dalam hukum positif dengan konsep Subjek hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Interkoneksi Konsep hukum dalam hukum Positif dengan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaerul Uman Drs dkk Ushul Fiqih 1, Pustaka Setia Bandung.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Ikhtiar Baru 1983.
- J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sstropnato, Pelajaran Hukum Indonesi. Jakarta : Gunung Agung 1980.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Edisi Revisi. Penerbit Kencana. Jakarta 2009
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Cet. III; Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015).
- Muhammad Muslehudin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam. Alih bahasa Yudian Wahyudi. Yogyakarta : Tiara Wacana 1997.
- Philipus M. Hadjon, at.al, 1997, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung : Aditya Bakti 1996.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Yogyakarta : LAIBRARY, 1985.

Jurnal

Nasarudin Umar, Prof DR. 2014 Konsep Hukum Modern : Suatu Perspektif Ke-Indonesia-an, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional.

Analiansyah. 2016. Pengembangan Subyek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Fikih : Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Islam di Indonesia”.

Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih

E. Fernando M. Manullang (2021). Subyek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional : Antara Manipulasi dan Fiksi”

Doli Witro, Mhd.Rasidin dan Muhamad Izazi Nurjaman (2021). Subyek Hukum dan Obyek Hukum : Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata”.

Internet

<https://www.hukumkeadilan.com/2021/02/langkah-langkah-serta-tujuan-html>

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-subjek-hu>